

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintahan memerlukan anggaran yang dapat dipergunakan untuk kegiatan pada waktu yang akan datang. Tercapainya realisasi atas anggaran dalam Kementerian/Lembaga negara merupakan hal yang penting diketahui oleh masyarakat saat ini karena masyarakat dapat menilai langsung kinerja dari lembaga pemerintahan negara dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggarannya. Untuk mengetahui kinerja dan ketaatan terhadap penggunaan APBN/APBD, Kementerian/Lembaga negara wajib menyusun laporan keuangan atas bagian anggarannya yang dikenal dengan Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk anggaran kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan keuangan secara bersamaan

Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang didalamnya terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 2 tentang Laporan Relisasi Anggaran. Pernyataan standar ini mengatur pelaporan realisasi anggaran entitas pelaporan secara tersanding sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri atas pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Menurut Rasdianto (2013 : 23) “Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan”.

Menurut UU 32/2004 (Bab 1 Pasal 1 ayat 16) “Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”.

Menurut Kepmendagri 29/2002 (Bab 1 Pasal 1 point q) “Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah”.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa bagaimana Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2018 dan 2017 sebagai perbandingannya, sehingga penulis memilih judul **“Analisis Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari judul di atas maka rumusan masalahnya adalah bagaimana perbandingan realisasi anggaran belanja tahun 2018 dan tahun 2017 pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan laporan realisasi anggarannya.

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Kegiatan**

### 1) Tujuan Kegiatan Magang

Adapun tujuan yang dapat dicapai dari pelaksanaan kegiatan magang ini adalah sebagai berikut :

1. Merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi Akuntansi pada Diploma III Universitas Andalas.
2. Untuk menambah pengalaman, informasi, dan pengetahuan mahasiswa serta dapat mempraktikan ilmu yang telah didapatkan dalam dunia kerja untuk memenuhi kebutuhan entitas.
3. Untuk mengaplikasikan langsung ke lapangan mengenai teori yang didapat pada bangku perkuliahan.
4. Untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana pengelolaan sumber daya ekonomi telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

### 2) Manfaat dari kegiatan magang

Penulis berharap agar akhir penulisan ini dapat memberikan kontribusi untuk berbagai pihak, diantaranya yaitu:

1. Bagi penulis

- a) Dapat menerapkan teori dan memperdalam pengetahuan yang pernah di dapatkan semasa perkuliahan di Universitas Andalas.
- b) Pembekalan mempersiapkan diri untuk menjadi seorang yang berpotensi, kompeten dan profesional agar siap memasuki dunia kerja nyata.
- c) Penulis bisa memperoleh data yang dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat tugas akhir sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi Program Diploma III.

2. Bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat

- a) Hasil laporan dapat menjadi masukan yang bisa menjadi pertimbangan bagi Badan Kepegawaian Daerah provinsi Sumatera Barat.
- b) Dapat menjalankan fungsi sosial terutama dalam pendidikan, pembinaan tenaga kerja dan kemajuan bangsa Indonesia.
- c) Mendukung program Pemerintah dibidang pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas.

3. Bagi pihak lain

Semoga hasil dari penulisan tugas akhir ini dapat digunakan untuk bahan pembelajaran atau referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

#### 1.4 Tempat dan Waktu Magang

Magang atau kuliah kerja pratek ini dilaksanakan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Batang Antokan No.4, Rimbo Kaluang, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Selama 40 (empat puluh) hari kerja, yang hari kerjanya yaitu dari hari senin s/d jumat.

## 1.5 Sistematika Penulisan

### Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini akan membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat kegiatan, tempat dan waktu magang, serta sistematika penulisan laporan.

### Bab II : Landasan teori

Dalam bab ini penulis mengemukakan mengenai pengertian Laporan Keuangan pemerintah, tujuan laporan keuangan, komponen-komponen laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, dan klasifikasi akun.

### Bab III : Gambaran Umum Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat

Membahas tentang gambaran umum Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari sejarah perusahaan, visi dan misi , uraian tugas dan struktur organisasi perusahaan dan aktivitas perusahaan yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

### Bab IV : Pembahasan

Merupakan bab yang membahas masalah yang diangkat. Mengemukakan data yang telah diperoleh selama kegiatan magang, yaitu bagaimana kinerja perusahaan pada tahun 2017 dan tahun 2018 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

### Bab V : Penutup

Bagian ini berisikan kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi demi kelangsungan aktivitas pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat dan juga bermanfaat untuk mahasiswa yang akan melaksanakan praktek kerja atau magang.